Agrosasepa:
Jurnal Ilmu Pertanian
Nomor 1 Volume 4
The article is published at https://jurnal.uic.ac.id/Agrosasepa

Diversifikasi Ekonomi Maluku Utara: Optimalisasi Pertanian, Perkebunan, dan Dukungan Fiskal untuk Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Inklusif

Nurbaya Hi Soleman[1], Abd. Wahab Hasyim[2], Hamidin Rasulu[3], Ida Hidayanti[4]
Universitas Ibnu Chaldun[1], Universitas Khairun Ternate [2 3 4]
Correspondent Email: nurbayasoleman@gmail.com

Abstrak
Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dalam beberapa tahun terakhir didominasi sektor pertambangan dan industri pengolahan nikel yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) regional. Namun, dominasi tersebut menimbulkan kerentanan jangka panjang, khususnya dalam konteks ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi daerah. Sektor pertanian dan perkebunan memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Makalah ini mengkaji perkembangan perekonomian Maluku Utara, kondisi sektor pertanian dan perkebunan, peran dukungan fiskal, tantangan yang dihadapi, serta strategi optimalisasi berbasis potensi lokal.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memadukan data primer dari wawancara dan observasi lapangan, serta data sekunder dari BPS, Bank Indonesia, Dinas Pertanian, Kementerian Pertanian, dan literatur akademik. Analisis dilakukan secara tematik melalui reduksi dan kategorisasi data, dengan validitas dijaga melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Maluku Utara mengalami surplus pada komoditas perkebunan (kelapa, pala, cengkeh), provinsi ini masih mengalami defisit pangan strategis seperti beras, bawang merah, cabai, daging, dan minyak goreng. Dukungan fiskal melalui instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK) Pertanian, Transfer ke Daerah (TKD), serta belanja pemerintah pusat dan daerah terbukti berperan penting dalam memperkuat kapasitas produksi pangan lokal dan menekan inflasi pangan.

Rekomendasi yang ditawarkan meliputi optimalisasi lahan, regenerasi petani, modernisasi teknologi pertanian, penguatan hilirisasi, pembentukan BUMD pangan, serta sinergi fiskal pusat dan daerah untuk ketahanan pangan berkelanjutan.

Kata Kunci: ketahanan pangan, pertanian, perkebunan, pertumbuhan ekonomi, fiskal, Maluku Utara

Abstract
In recent years, North Maluku's economic growth has been dominated by the mining sector and nickel processing industries, which contribute significantly to the regional Gross Domestic Product (GDP). However, this dominance creates long-term vulnerabilities, particularly in terms of food security and regional economic independence. The agriculture and plantation sectors hold substantial potential to support inclusive growth and strengthen food security. This study examines North Maluku's economic development, the condition of agriculture and plantation sectors, the role of fiscal support, the challenges faced, and optimization strategies based on local potential.

This research employs a descriptive qualitative approach by combining primary data from interviews and field observations with secondary data from Statistics Indonesia (BPS), Bank Indonesia, the Provincial Agriculture Office, the Ministry of Agriculture, and relevant academic literature. Data were analyzed thematically through reduction and categorization, with validity ensured through source and method triangulation. The findings indicate that although North Maluku records a surplus in plantation commodities (coconut, nutmeg, clove), the province still suffers from deficits in strategic food commodities such as rice, shallots, chili, meat, and cooking oil. Fiscal support through instruments such as the Special Allocation Fund (DAK) for agriculture, intergovernmental fiscal transfers (TKD), and central as well as regional government spending plays a vital role in strengthening local food production capacity and mitigating food-driven inflation. Recommended strategies include land optimization, farmer regeneration, agricultural modernization, strengthening downstream industries, establishing regional food enterprises (BUMD), and enhancing fiscal synergy between central and local governments to ensure sustainable food security.

***Keywords**: Weed POC concentration, kale growth and yield*

Accepted Date: 1 Februari 2026
Publish Date: 26 Februari 2026

Pendahuluan

Ketergantungan pada sektor pertambangan menimbulkan risiko keberlanjutan. Fluktuasi harga nikel di pasar global, ketidakpastian permintaan, dan isu lingkungan dapat berdampak pada stabilitas ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif, dengan capaian 32,09% (yoy) pada triwulan II tahun 2025, meskipun sedikit melambat dibanding triwulan sebelumnya yang mencapai 34,58% (yoy) seperti yang terlihat pada table 1. Pertumbuhan ini masih sangat dipengaruhi oleh sektor pertambangan dan industri pengolahan nikel, terutama terkait dengan permintaan global untuk bahan baku baterai kendaraan listrik. Namun, ketergantungan berlebih pada sektor tambang menimbulkan kerentanan jangka panjang.

Meskipun sektor tambang ini memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB regional seperti yang terlihat pada tabel1, namun dominasinya menciptakan kerentanan ekonomi jangka panjang, terutama dalam hal ketahanan pangan dan kemandirian daerah. Hal ini terjadi karena pertumbuhan yang pesat tidak sepenuhnya inklusif dan tidak merata, serta dapat menimbulkan ketidakstabilan jika harga komoditas global bergejolak. Kondisi ini mengkonfirmasi argumen dalam teori Todaro & Smith (2012) yang menekankan bahwa pertumbuhan yang tidak inklusif dan terlalu bergantung pada satu sektor ekstraktif dapat menciptakan ketimpangan sosial dan kerentanan ekonomi jangka panjang.

Kajian empiris lainnya juga menunjukkan relevansi urgensi diversifikasi ekonomi. Saragih (2020) menemukan bahwa daerah dengan ketergantungan tinggi pada sektor tambang cenderung menghadapi volatilitas ekonomi lebih besar dibandingkan daerah dengan struktur ekonomi yang lebih beragam. Fitriani & Rahmawati (2021) membuktikan bahwa defisit pangan di provinsi berbasis kepulauan meningkatkan kerentanan inflasi musiman, terutama pada komoditas cabai dan bawang. Hal ini relevan dengan kondisi Maluku Utara yang masih mengalami defisit pangan strategis.

Temuan internasional juga menguatkan urgensi tersebut. World Bank (2021) menegaskan bahwa negara atau daerah yang sangat bergantung pada komoditas tambang lebih rentan terhadap boom and bust cycle ekonomi, sementara diversifikasi melalui pertanian mampu meningkatkan ketahanan jangka panjang. FAO & IFAD (2020)

melaporkan bahwa wilayah kepulauan menghadapi biaya logistik pangan 30–50% lebih tinggi dibanding daratan, sehingga kemandirian produksi pangan lokal menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan.

Oleh karena itu, optimalisasi sektor pertanian dan perkebunan menjadi sangat krusial sebagai strategi pembangunan yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Dengan kondisi ini, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana peran optimalisasi sektor pertanian dan perkebunan mengimbangi pertumbuhan ekonomi dengan didukung oleh kebijakan fiskal untuk memperkuat ketahanan pangan di propinsi Maluku Utara.

Tinjauan Literatur

1. Grand Teori

Teori Pertumbuhan Douglas (1928): Teori ini, melalui fungsi produksi Cobb-Douglas, menjelaskan hubungan antara input (modal, tenaga kerja) dan output (produksi). Dalam konteks artikel ini, dukungan fiskal pemerintah (belanja pemerintah untuk pertanian) dianggap sebagai input modal yang esensial. Dengan mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur pertanian, teknologi, dan penyuluhan, produktivitas sektor pertanian dapat ditingkatkan. Peningkatan ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan hasil panen, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan pangan.

Teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah Todaro & Smith (2012): Teori ini menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi dari sektor ekstraktif ke sektor yang lebih inklusif dan berkelanjutan, seperti pertanian. Todaro & Smith berpendapat bahwa pertumbuhan yang didominasi oleh satu sektor, seperti pertambangan, dapat menciptakan ketimpangan dan kerentanan. Oleh karena itu, diversifikasi ke sektor pertanian dianggap sebagai strategi yang lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan, menyerap tenaga kerja, dan memastikan stabilitas ekonomi jangka Panjang. Keterkaitan teori ini dengan ketahanan pangan terletak pada pertumbuhan berbasis pertanian lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan stabilitas sosial-ekonomi.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk pada setiap saat, baik dalam jumlah, mutu, aman, maupun merata. Ketahanan Pangan dan Dukungan Fiskal; Teori Douglas, khususnya fungsi produksi Cobb-Douglas (1928), dapat dikaitkan dengan ketahanan pangan dan dukungan fiskal melalui konsep peningkatan produktivitas. Teori ini menyatakan bahwa output (hasil pertanian) adalah fungsi dari input (modal, tenaga kerja). Dalam konteks ketahanan pangan, dukungan fiskal pemerintah, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Pertanian, berperan sebagai input modal yang esensial. Dukungan ini membiayai infrastruktur irigasi, bantuan benih, dan mekanisasi pertanian, yang secara langsung meningkatkan produktivitas lahan dan tenaga kerja petani.

Ketahanan pangan didefinisikan oleh FAO (1996) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan setiap individu, baik dari sisi ketersediaan, akses, maupun pemanfaatannya. Dalam konteks daerah, ketahanan pangan erat kaitannya dengan kapasitas produksi lokal. Semakin besar ketergantungan pada pasokan luar daerah, semakin rentan suatu wilayah terhadap gejolak harga dan gangguan distribusi.

2. Kajian Empiris

Kajian empiris internasional memperkuat teori ini. Barrett (2010) dalam Food Security and Sociopolitical Stability menemukan bahwa ketahanan pangan berhubungan erat dengan stabilitas sosial-ekonomi, khususnya di negara berkembang.

Pingali (2015) dalam Agricultural Economics menekankan bahwa transformasi pertanian modern melalui mekanisasi, varietas unggul, dan digitalisasi merupakan faktor kunci pertumbuhan inklusif di Asia. Christiaensen & Demery (2018) menunjukkan bahwa pertumbuhan berbasis pertanian lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan di Afrika dan Asia dibanding pertumbuhan berbasis industri ekstraktif. Selain itu, Jayne et al. (2019) menegaskan pentingnya kebijakan fiskal dan investasi publik di sektor pertanian, yang terbukti meningkatkan produktivitas serta memperkuat rantai pasok pangan di negara berkembang.

Di tingkat nasional, Hidayat et al. (2022) menunjukkan pengembangan kawasan pangan berbasis hortikultura di Sulawesi Tengah mampu menurunkan defisit cabai rawit hingga 23% dalam dua tahun. Nasution & Lubis (2021) menemukan bahwa hilirisasi komoditas perkebunan meningkatkan kontribusi sektor non-migas terhadap PDRB daerah hingga 15%. Arifin (2020) menunjukkan bahwa dukungan fiskal berupa DAK Pertanian mampu meningkatkan produktivitas padi rata-rata 0,8 ton/ha di Jawa Tengah.

Kebijakan pembangunan nasional periode 2025–2029 yang mengamanatkan swasembada pangan dan hilirisasi sumber daya alam sejalan dengan RPJMD Provinsi Maluku Utara..

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memadukan data primer dari wawancara dan observasi lapangan, serta data sekunder dari BPS, Bank Indonesia, Dinas Pertanian, Kementerian Pertanian, dan literatur akademik. Analisis dilakukan secara tematik melalui reduksi dan kategorisasi data, dengan validitas dijaga melalui triangulasi sumber dan metode

Hasil dan Pembahasan

1. Perkembangan Ekonomi Maluku Utara

Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada 2025 masih sangat tinggi dibanding rata-rata nasional. Kontribusi sektor industri pengolahan dan pertambangan mencapai lebih dari 60% PDRB. Namun, sektor non-tambang juga menunjukkan peran signifikan, khususnya pertanian, perdagangan, konstruksi, dan transportasi. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan perekonomian yang bersumber pada sektor pertanian masih lemah.

Tabel 1: Tabel Diperbarui (2020–2025 sebagian)

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025* (Q1 / Q2)
Pertumbuhan Ekonomi (yoy)	4,92 %	15,36 %	22,96 %	20,49 %	13,73 %	34,58 % (Q1) / 32,09 % (Q2)

Sumber :Maluku Utara dalam Angka 2025 di situs BPS

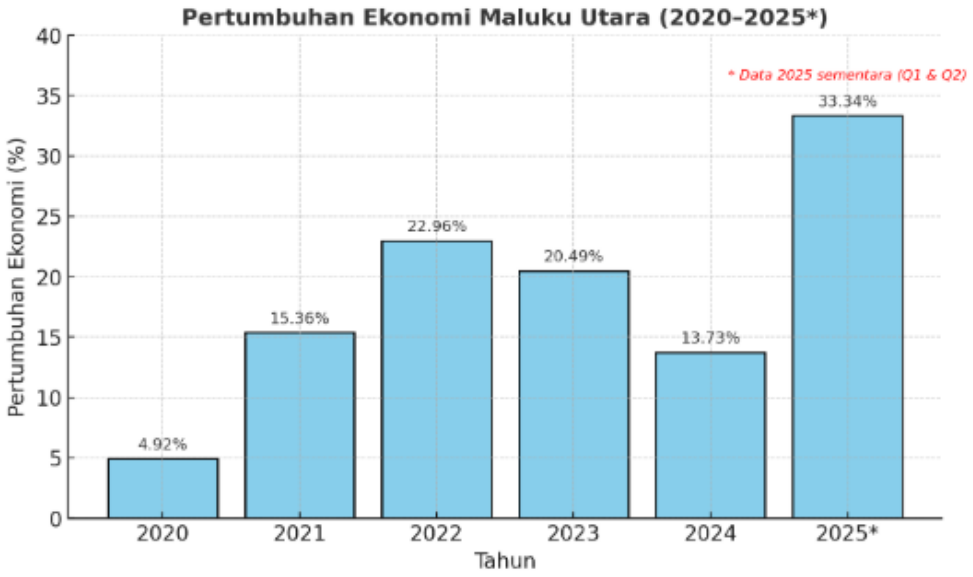

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara

Analisis Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara (2020–2025)

1. Tahun 2020 (4,92%**)**. Pertumbuhan ekonomi relatif rendah karena dampak pandemi Covid-19 yang menekan aktivitas ekonomi. Namun, Maluku Utara masih mampu tumbuh positif, terutama ditopang oleh industri pengolahan nikel yang mulai berkembang.
2. Tahun 2021 (15,36%)**.** Terjadi lonjakan signifikan setelah pemulihan pasca pandemi. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan ekspor nikel seiring meningkatnya permintaan global untuk bahan baku baterai kendaraan listrik.
3. Tahun 2022 (22,96%)**.** Pertumbuhan mencapai titik tertinggi, menjadikan Maluku Utara sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tercepat secara nasional. Kontribusi terbesar berasal dari sektor pertambangan dan industri pengolahan, dengan investasi besar-besaran di kawasan industri berbasis nikel.
4. Tahun 2023 (20,49%)**.** Pertumbuhan mulai melambat meski masih tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti fluktuasi harga nikel global serta terbatasnya diversifikasi ekonomi. Sektor non-tambang (pertanian, perdagangan, jasa) belum mampu menjadi penyeimbang.
5. Tahun 2024 (13,73%)**.** Terjadi penurunan tajam. Penyebab utamanya antara lain penurunan harga komoditas tambang global, berkurangnya kontribusi sektor industri pengolahan, serta belum optimalnya sektor pertanian dan perkebunan dalam menopang pertumbuhan.

Hal ini menegaskan kerentanan ekonomi Maluku Utara akibat ketergantungan berlebihan pada sektor tambang. Defisit pangan strategis (seperti beras dan bawang merah) membuat daerah ini rentan terhadap gejolak inflasi musiman. Hal ini terlihat sekali jika saat-saat akan lebaran atau tahun baru, di mana harga pangan akan meningkat drastis.

2. Kondisi Inflasi dan Kesejahteraan

Inflasi Maluku Utara pada Juli 2025 tercatat 0,39% (mtm), sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional. Komoditas pangan seperti beras, cabai rawit, bawang merah, dan ikan segar menjadi penyumbang utama inflasi. Hal ini menunjukkan lemahnya ketahanan pangan lokal. Dengan adanya kondisi demikian maka, perlu adanya dukungan infra

stuktur dan kesiapan SDM, khususnya penyuluh pertanian, dengan mengadopsi teknologi digitalisasi sehingga dapat menggunakan strategi dan metode penyuluhan yang efektif dan efisien guna meningkatkan produksi pertanian yang secara tidak langsung dapat menurunkan inflasi dan meningkatkan kesejahteraan.

3. Kondisi Sektor Pertanian dan Perkebunan

Defisit pangan masih menjadi isu utama. Data tahun 2024 menunjukkan Maluku Utara hanya mampu memenuhi 14,71% kebutuhan beras lokal. Demikian pula bawang merah (defisit 2.937 ton), cabai rawit (1.179 ton), cabai keriting (1.368 ton), dan tomat (1.537 ton). Produksi telur ayam lokal hanya mampu memenuhi 3% kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat banyak pasokan dari daerah2 penyedia yang mendistribusikan ke Maluku Utara, sehingga harga pangan menjadi meningkat.

Di sisi lain, sektor perkebunan menunjukkan potensi besar. Produksi kelapa mencapai 200,1 ribu ton per tahun, menempatkan Maluku Utara pada posisi kelima secara nasional. Pala dan cengkeh juga memiliki nilai strategis dengan kontribusi besar terhadap ekspor non-tambang.Akan tetapi, harga satuan yang jauh dari harapan mansyarakat, hal ini dibutuhkan Pemimpin daerah yang bijak agar dapat membuat kebijakan harga pasar yang tidak merugikan petani.

Tabel 2. Pengembangan Pertumbuhan Pangan di Maluku Utara

Komoditas	Kebutuhan (Ton)	Produksi Lokal (Ton)	Defisit / Surplus	Strategi Pengembangan
Beras	132.831	17.490	Defisit 115.341	Intensifikasi padi sawah & ladang, varietas unggul, irigasi & embung, mekanisasi, program Zona Bangkit Prioritas.
Jagung	56.213	31.450	Defisit 24.763	Pengembangan jagung hibrida, integrasi dengan peternakan, perluasan lahan produktif.
Cabai Rawit	7.891	6.712	Defisit 1.179	Budidaya berbasis greenhouse, kalender tanam adaptif iklim, dukungan sarana produksi.
Cabai Keriting	6.780	5.412	Defisit 1.368	Pengembangan Zona Bangkit hortikultura, pendampingan petani milenial.
Bawang Merah	8.210	5.273	Defisit 2.937	Penerapan teknologi umbi mini & kultur jaringan, penyediaan lahan khusus hortikultura.
Tomat	6.452	4.915	Defisit 1.537	Intensifikasi budidaya, integrasi pasar lokal & agroindustri.
Telur Ayam	21.500	645	Defisit 20.855	Pengembangan peternakan unggas lokal, insentif investasi sektor peternakan.
Kelapa	150.000	200.100	Surplus 50.100	Hilirisasi (minyak kelapa, VCO, turunan industri), ekspor & agroindustri.
Pala & Cengkeh	65.000	89.000	Surplus 24.000	Diversifikasi produk olahan (rempah, minyak atsiri), penguatan rantai pasok ekspor.

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara. (2024). *Paparan Rakor Pangan Maluku Utara*. Ternate: Distan Malut. → Data kebutuhan & produksi pangan (beras, jagung, hortikultura, telur).

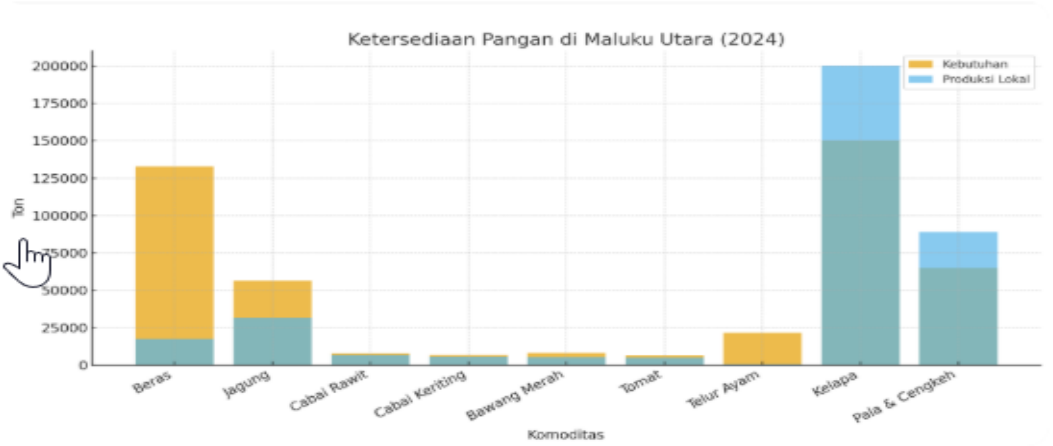

4. Zona Bangkit

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menetapkan Zona Bangkit Prioritas untuk padi dan jagung, serta Zona Bangkit Unggulan untuk hortikultura (cabai, bawang merah, tomat), peternakan (sapi, kambing, ayam), dan perkebunan (kelapa, pala, cengkeh). Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat swasembada pangan dan memperkuat agribisnis daerah.

5. Strategi Teknis

Strategi teknis untuk meningkatkan produktivitas pertanian diarahkan melalui: (a) rehabilitasi irigasi dan pembangunan embung, (b) introduksi varietas unggul berumur pendek (IP 200–300), (c) mekanisasi pertanian (traktor, rice transplanter, combine harvester), (d) pola tanam berbasis kalender iklim, (e) diversifikasi pangan berbasis jagung, sagu, dan hortikultura.

6. Best Practices: Hilirisasi dan Pertanian Organik dan 7. Pengembangan SDM melalui Pendidikan dan pelatihan. Hilirisasi Bawang Goreng di Sulawesi Tengah menjadi contoh sukses integrasi rantai pasok hulu-hilir. Melibatkan petani, UMKM, perusda, dan pemerintah daerah, program ini meningkatkan produktivitas sekaligus menciptakan nilai tambah. Pertanian Organik Ponpes Ibadurrahman di Halmahera Timur berhasil meningkatkan produktivitas padi dari 3 ton/ha menjadi 4,6 ton/ha. Model ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi dan perubahan pola tanam dapat meningkatkan kemandirian pangan. Untuk itu, maka perlu adanaya penyediaan infra struk baik yang berkaitan dengan teknologi diditalisasi untuk mempermudah akses informasi maupun infra struktur jalan ataupun tol laut untuk mempependek rantai pasok.

7. Dukungan Fiskal

Pada 2025, belanja APBN di Maluku Utara diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan melalui DAK Pertanian, pembangunan irigasi kecil, bantuan benih, subsidi pupuk, serta program pengendalian inflasi pangan. Dana Transfer ke Daerah (TKD) juga memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk membiayai program pangan lokal.

Di Maluku Utara, DAK Pertanian dan belanja pemerintah pusat untuk ketahanan pangan dialokasikan untuk sarana prasarana pertanian, jalan tani, dan penyuluhan. Realisasi APBD juga menunjukkan peningkatan belanja fungsi pertanian dan pangan di

beberapa daerah. Ini adalah penerapan nyata dari teori Douglas, di mana investasi modal (fiskal) meningkatkan output pertanian untuk mengurangi defisit pangan dan memperkuat ketahanan pangan lokal.

Sinergi fiskal pusat-daerah diperlukan agar belanja fiskal tidak terfragmentasi. Misalnya, subsidi pupuk dan DAK pertanian di tingkat pusat harus diikuti dukungan APBD untuk penyediaan infrastruktur lokal, penyuluhan, dan kelembagaan petani.

Belanja sosial pangan (bantuan beras, operasi pasar) juga menjadi buffer penting ketika harga pangan melonjak. Hal ini mendukung strategi ketahanan pangan daerah dengan menstabilkan harga sekaligus melindungi masyarakat miskin dari gejolak harga.

Tabel 3: Realisasi APBN Regional Maluku Utara (s.d Juli 2025)

Uraian	2024 (Rp M)	Realisasi (Rp M)	% thd Pagu	2025 (Rp M)	Realisasi (Rp M)	% thd Pagu	Pertumbuhan (%)
Pendapatan & Hibah	6.710,24	1.655,32	24,67	3.798,61	2.496,44	65,72	+33,69
Belanja Negara	18.960,47	9.633,77	50,81	17.303,55	8.973,49	51,86	-7,36
Belanja Pemerintah Pusat	6.374,32	2.856,70	44,82	5.176,34	2.204,39	42,59	-29,59
Transfer ke Daerah	12.586,15	6.777,07	53,85	12.127,21	6.769,10	55,82	-0,12
Surplus/Defisit	(12.250,23)	(7.978,45)	65,13	(13.504,94)	(6.477,05)	47,96	-23,18

Sumber : Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Maluku Utara. (2025

Tabel 4: Realisasi APBD Konsolidasi Maluku Utara (s.d Juli 2025)

Uraian	2024 (Rp M)	Realisasi (Rp M)	% thd Pagu	2025 (Rp M)	Realisasi (Rp M)	% thd Pagu	Pertumbuhan (%)
Pendapatan Daerah	15.591,03	6.763,99	43,38	16.189,80	7.846,64	48,47	+16,01
PAD	2.331,20	552,28	23,69	2.045,38	1.068,05	52,22	+93,39
Pajak Daerah	1.309,01	280,06	21,39	1.260,37	822,75	65,28	+193,77
Pendapatan Transfer	12.503,04	6.205,46	49,63	12.127,21	6.769,10	55,82	+9,08
Belanja Daerah	16.203,78	5.341,38	32,96	16.995,11	5.757,28	33,88	+7,79
Belanja Operasi	10.506,07	3.719,36	35,40	11.522,26	4.355,63	37,80	+17,11

Sumber : Badan Pusat Statistik. (2025). ***Provinsi Maluku Utara dalam Angka 2025*.** **Ternate: BPS.**

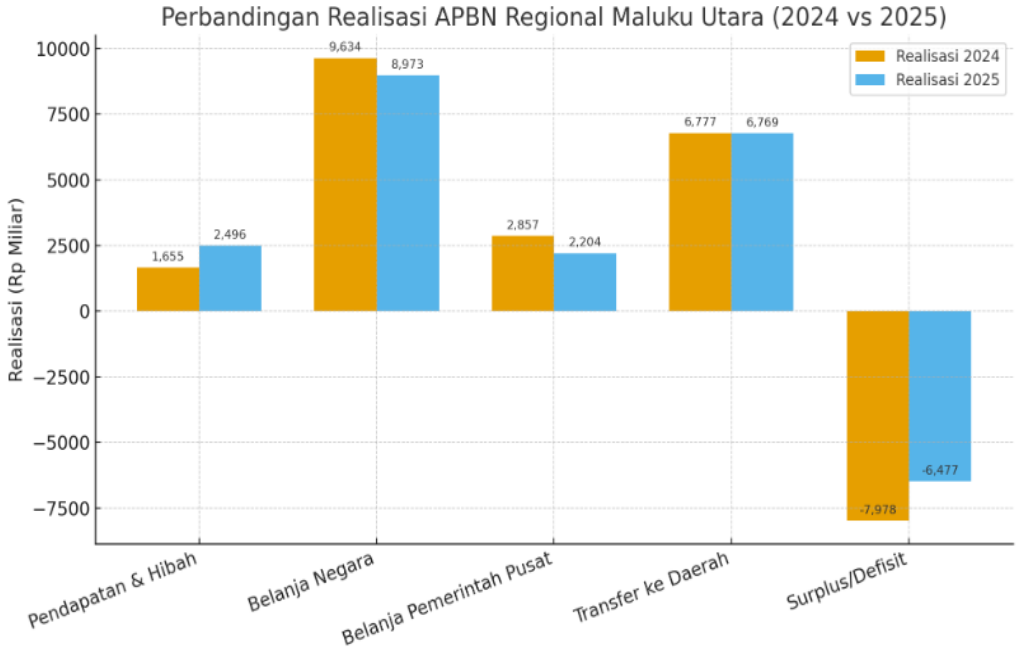

Sumber : Badan Pusat Statistik. (2025). ***Provinsi Maluku Utara dalam Angka 2025*.** **Ternate: BPS**

Tabel 5: Dukungan Fiskal untuk Ketahanan Pangan (2025)

Instrumen	Alokasi (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)	% Realisasi	Fokus Utama
Belanja Pemerintah Pusat (Satker Vertikal)	393,55	134,13	32,92	Irigasi, penyuluhan, sarana prasarana pertanian
DAK Fisik (Ketahanan Pangan)	134,42	0	0	Jalan tani, pangan akuatik, transportasi perairan
DAK Non-Fisik (Pertanian & Pangan)	3.059,20	1.529,60	50	Penyuluhan, puskeswan, bantuan bibit/pakan
Dana Desa (Earmark Ketahanan Pangan)	189,67	36,71	19,36	Lumbung pangan desa, jalan tani, pemberdayaan masyarakat
Total	**720,91**	**~1.700+**	**≈ 40%**	Penguatan produksi & distribusi pangan

Sumber : DJPb Malut 2025.

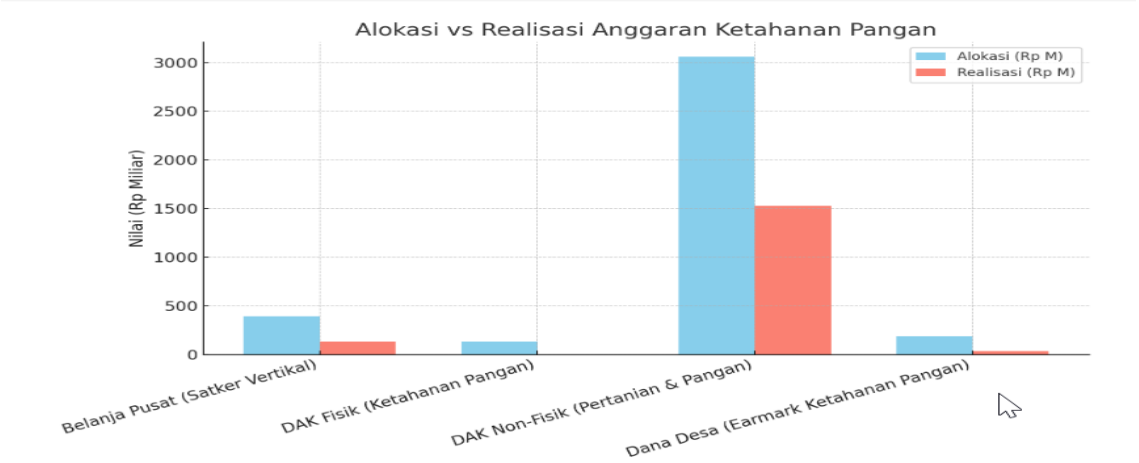

Sumber : DJPb Malut 2025.

Tabel 6: Realisasi APBD Fungsi Pertanian & Pangan per Daerah (2020–2024)

Pemda	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Maluku Utara	45,51	47,33	50,63	73,19	86,32
Halmahera Tengah	13,03	17,16	39,26	42,97	45,56
Halmahera Utara	10,27	19,88	42,51	15,35	9,73
Halmahera Selatan	10,74	26,10	40,67	55,31	57,80
Kepulauan Sula	15,54	18,67	28,52	5,80	8,46
Halmahera Timur	22,32	31,42	33,60	57,02	77,21
Halmahera Barat	13,71	23,66	14,04	10,05	10,78
Pulau Morotai	11,63	12,43	18,32	26,64	15,19
Pulau Taliabu	5,17	7,14	25,41	3,57	7,18
Ternate	15,73	19,40	21,79	21,35	24,46
Tidore Kepulauan	13,70	15,14	33,98	41,74	35,86
Total	**177,34**	**238,34**	**348,73**	**352,98**	**378,55**

Sumber : DJPb Malut 2025.

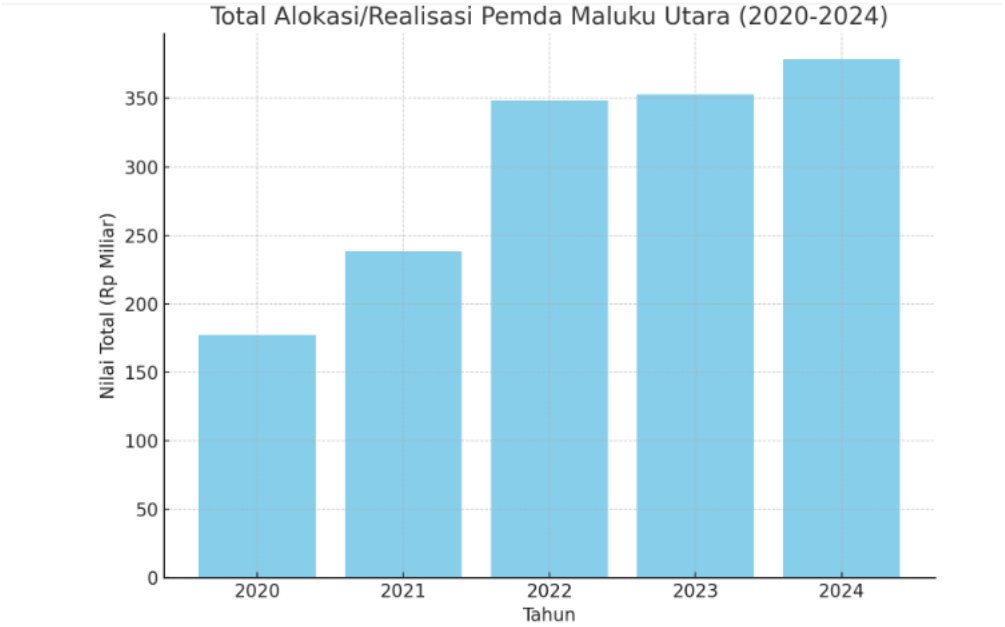

Sumber : DJPb Malut 2025

Selain temuan empiris yang ditemukan, penulis juga menemukan bahwa dukungan fiskal, produktivitas pertanian, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi daerah merupakan satu keterkaitan yang harus diperhatikan. Alokasi anggaran melalui DAK Pertanian, TKD, dan belanja APBD terbukti tidak hanya berperan dalam penyediaan infrastruktur pertanian (irigasi, jalan tani, embung), tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas lahan dan efisiensi distribusi pangan. Peningkatan kapasitas produksi ini secara langsung memperkuat ketahanan pangan, mengurangi ketergantungan impor dari daerah lain, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap pengendalian inflasi pangan. Dengan demikian, terdapat rantai hubungan strategis: dukungan fiskal → peningkatan produktivitas pertanian → penguatan ketahanan pangan → stabilitas harga → pertumbuhan ekonomi inklusif.

Dari sisi sosial-ekonomi, defisit pangan strategis di Maluku Utara tidak hanya berdampak pada tingginya inflasi musiman, tetapi juga memperlebar beban pengeluaran rumah tangga, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah. Kesenjangan antar wilayah juga terlihat, di mana beberapa kabupaten/kota memiliki kapasitas produksi lebih tinggi (misalnya Halmahera Timur untuk hortikultura), sementara daerah perkotaan seperti Ternate dan Tidore lebih bergantung pada pasokan dari luar. Hal ini menegaskan perlunya kebijakan distribusi yang merata serta penguatan peran BUMD pangan sebagai buffer logistik daerah.

Selain itu, peran penyuluh pertanian berbasis digital menjadi kunci transformasi jangka panjang. Adopsi teknologi digital dalam penyuluhan memungkinkan petani memperoleh informasi pasar, iklim, dan teknologi produksi secara lebih cepat dan akurat. Hal ini sejalan dengan *best practices* pertanian organik Ponpes Ibadurrahman dan hilirisasi bawang goreng di Sulawesi Tengah, yang menunjukkan bahwa integrasi teknologi dan kelembagaan lokal dapat meningkatkan nilai tambah dan kemandirian pangan. Oleh karena itu, strategi pembangunan pertanian di Maluku Utara perlu diarahkan tidak hanya pada intensifikasi lahan dan hilirisasi, tetapi juga pada transformasi digital, regenerasi petani milenial, dan integrasi fiskal jangka panjang menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Kesimpulan

1. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara 2020–2024 menunjukkan tren yang tinggi namun fluktuatif, sangat dipengaruhi oleh dominasi sektor pertambangan dan industri pengolahan nikel. Kondisi ini menegaskan adanya kerentanan struktural akibat minimnya diversifikasi ekonomi.
2. Sektor pertanian dan perkebunan memiliki potensi besar sebagai penopang ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi inklusif, namun masih menghadapi tantangan berupa defisit pangan strategis (beras, bawang merah, cabai, daging, minyak goreng) dan keterbatasan infrastruktur.
3. Dukungan fiskal (DAK Pertanian, TKD, belanja APBN/APBD) terbukti memainkan peran kunci dalam memperkuat produktivitas pertanian melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan subsidi, serta penguatan penyuluhan.
4. Hilirisasi agroindustri dan digitalisasi penyuluhan menjadi faktor penguat yang mempercepat tercapainya ketahanan pangan. Keduanya berkontribusi pada peningkatan nilai tambah, efisiensi distribusi, serta penguatan posisi petani dalam rantai pasok.
5. Rantai hubungan strategis antara fiskal, produktivitas pertanian, ketahanan pangan, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi inklusif menunjukkan bahwa penguatan sektor pertanian merupakan strategi fundamental bagi transisi ekonomi Maluku Utara dari ketergantungan pada tambang menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Saran

1. Diversifikasi Ekonomi: Pemerintah daerah perlu memperkuat sektor pertanian dan perkebunan sebagai penyeimbang dominasi sektor tambang, dengan fokus pada komoditas pangan strategis dan perkebunan unggulan.
2. Optimalisasi Dukungan Fiskal: Alokasi DAK dan TKD di bidang pertanian harus lebih diarahkan pada pembangunan irigasi, jalan tani, gudang penyimpanan, serta subsidi benih dan pupuk yang tepat sasaran.
3. Penguatan Hilirisasi**:** Dorong pembangunan industri pengolahan lokal (kopra, pala, cengkeh, hortikultura) untuk menciptakan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja di daerah.
4. Digitalisasi Penyuluhan: Tingkatkan kapasitas penyuluh pertanian berbasis teknologi digital agar petani dapat mengakses informasi pasar, iklim, dan inovasi teknologi dengan cepat.
5. Penguatan Kelembagaan Pangan**:** Bentuk atau perkuat BUMD pangan sebagai buffer stok dan distribusi, sehingga dapat menekan inflasi pangan musiman.
6. Regenerasi Petani: Libatkan generasi muda (petani milenial) dalam program modernisasi pertanian agar keberlanjutan sektor ini terjamin dalam jangka panjang.
7. Sinergi Pusat-Daerah**:** Perlu koordinasi erat antara kebijakan fiskal pusat dan daerah untuk menjamin keberlanjutan program ketahanan pangan dan transformasi ekonomi Maluku Utara.

Daftar Pustaka

Arifin, B. (2020). *Dampak Dana Alokasi Khusus terhadap Produktivitas Padi di Jawa Tengah*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia, 21(2), 145–160.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Provinsi Maluku Utara dalam Angka 2025*. Ternate: BPS.

Bank Indonesia. (2025). *Laporan Perekonomian Provinsi Maluku Utara Triwulan II 2025*. Ternate: BI.

Barrett, C. B. (2010). *Food Security and Sociopolitical Stability*. Oxford: Oxford University Press.

Christiaensen, L., & Demery, L. (2018). *Agriculture in Africa: Telling Myths from Facts*. Washington DC: World Bank.

Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara. (2024). *Paparan Rakor Pangan Maluku Utara*. Ternate: Distan Malut.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Malut. (2025). *Materi Forum Ekonomi BI*. Ternate: DJPb Malut.

FAO. (1996). *Rome Declaration on World Food Security*. Rome: FAO.

FAO & IFAD. (2020). *The State of Food Security and Nutrition in Small Island Developing States*. Rome: FAO.

Fitriani, N., & Rahmawati, E. (2021). *Dampak Defisit Pangan terhadap Inflasi di Wilayah Kepulauan*. Jurnal Ekonomi Regional, 9(1), 33–47.

Hayami, Y., & Ruttan, V. W. (1985). *Agricultural Development: An International Perspective*. Johns Hopkins University Press.

Hidayat, A., Nur, S., & Lestari, D. (2022). *Pengembangan Kawasan Hortikultura untuk Ketahanan Pangan Daerah*. Jurnal Pangan dan Agribisnis, 10(2), 77–91.

Jayne, T. S., Chamberlin, J., & Headey, D. (2019). *Land Pressures, the Evolution of Farming Systems, and Development Strategies in Africa*. Food Policy, 48(1), 1–17.

Musgrave, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance*. New York: McGraw-Hill.

Nasution, H., & Lubis, A. (2021). *Hilirisasi Komoditas Perkebunan dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 12(3), 201–215.

Pingali, P. (2015). *Agricultural Policy and Nutrition Outcomes – Getting Beyond the Preoccupation with Staple Grains*. Agricultural Economics, 46(4), 445–454.

Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. New York: Free Press.

Saragih, H. (2020). *Ketergantungan Ekonomi Tambang dan Kerentanan Daerah*. Jurnal Pembangunan Daerah, 15(2), 89–102.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic Development* (11th ed.). Addison-Wesley.

World Bank. (2021). *Commodity Dependence and Economic Vulnerability*. Washington DC: World Bank.